

Pers Sebagai Kekuatan Sosial (2)

* Sebuah Pengamatan Awam

Ariel Heryanto

BAGIAN pertama tulisan ini kemarin menunjukkan jatidiri pers mutakhir yang bertolak belakang dari gambaran muluk dalam berbagai pembahasan normatif. Kajian itu berkesimpulan pesimis, disusun berdasarkan pertimbangan yang gagahnya disebut sebagai strukturalisme. Kajian strukturalis meneliti kaitan-kaitan fundamental, bukan gejala kasatmata dan detail empirik suatu realitas dalam sejarah sosial.

Tulisan itu berat sebelah jika tak dilengkapi dengan sebuah kajian historis, biar pun secara sekilas dan awam. Kajian atau spekulasi historis berikut ini memberikan gambaran yang sedikit lebih cerah atau optimis.

Protagonis sejarah

Setiap jaman membentuk dan sekaligus terbentuk oleh tokoh-tokoh utamanya. Mereka menjadi tokoh yang dalam sastra dan drama disebut sebagai protagonis dan antagonis. Telah sering kita dengar bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, ada tiga tokoh utama: Soekarno, PKI dan militer. Juga sering diakui bahwa pada masa Orde Baru hanya ada protagonis tunggal yakni gabungan antara birokrasi negara dan militer. Sejak masa Demokrasi Terpimpin negara berjaya sebagai protagonis sejarah Indonesia. Sebelumnya, partai-partai politik ikut menjadi tokoh utama yang menonjol.

Secara absolut bisa dikatakan tak ada antagonis atau oposisi dalam masyarakat mutakhir kita. Tapi jika dicari terus, siapa diluar negara yang secara relatif paling siap dan mungkin dapat diharapkan akan menjadi kekuatan antagonis jawabnya mungkin adalah pers. Kemungkinan potensial lain adalah solidaritas kaum Muslim. Tapi yang jelas bukan partai politik dan parlemen. Bukan industrialis. Bukan LSM, demonstran mahasiswa atau seniman.

Untuk mempertimbangkan pandangan itu, sisa tulisan di bawah ini akan mencatat sekilas proses pertumbuhan pers mutakhir kita dan apa konsekuensi pertumbuhan itu. Namun, ada baiknya kita tegaskan disini dulu apakah pendapat pada alinea di atas tidak bertentangan dengan pendapat utama dari tulisan kemarin.

Bukan tak ada pertentangan sama sekali. Tapi keduanya tidak bersifat saling menyangkal. Pada tulisan terdahulu kita lihat pers tidak akan merasa perlu (karena tidak berkepentingan) memperjuangkan demokratisasi. Pers tidak dapat diharapkan berniat menjadi kritik sosial. Di bawah ini kita tidak mempersoalkan niat dan kepentingan industri pers an sich. Yang akan kita teliti ialah pertumbuhan pers yang tanpa sengaja akan dengan sendirinya mendorong pertumbuhan antifesa, antagonis dan oposisi.

Pertumbuhan pers mutakhir

Setidaknya-tidaknya ada tiga

Secara absolut bisa dikatakan tak ada antagonis dan oposisi dalam masyarakat mutakhir kita. Tapi jika dicari terus, siapa di luar negara yang secara relatif paling siap dan mungkin diharapkan akan menjadi kekuatan antagonis sejarah jawabnya mungkin adalah pers. Kemungkinan potensial lainnya adalah solidaritas kaum muslim. Tapi yang jelas bukanlah parlemen. Bukan industrialis, LSM, demonstran mahasiswa atau seniman.

faktor utama yang bertanggung jawab atas pertumbuhan industri dan kekuatan sosial pers kita.

Pertama, melubernya modal secara besar-besaran dari pertumbuhan kapitalisme Indonesia mutakhir. Luberan modal ini menggenggam berbagai bidang wilayah, termasuk penerbitan pers. Apa yang kini kita saksikan? Modal mengejar-gejar kaum jurnalis, bukannya jurnalis terlunta-lunta mencari modal dan lowongan kerja. Bajak-membajak jurnalis senior hanyalah sebagian dari gejala ini. Karena alasan teknis, finansial, dan politis, kebanyakan penerbit kecil berantakan. Bertumbuhlah jaringan manajemen industri pers secara berantai. Yang terjadi bukan lagi persaingan antar penerbit besar tapi antar kelompok besar pers.

Kedua, melubernya angkatan kerja tahun 1980an dari kaum muda kota yang terdidik baik di alam "stabilitas dan keamanan" Orde Baru. Mereka menjadi bagian penting bagi pertumbuhan industri pers mutakhir kita. Mereka tidak hanya menyediakan tenaga baru dalam perkembangan pers yang menantang tata kerja baru dan teknologi mutakhir. Mereka adalah kaum yang apolitis, berkiblat hidup pragmatis, menuntut kerja

terhormat dengan gaji besar. Ciri-ciri ini pas dengan dinamika pers kita. Kaum muda

kota ini juga menjadi sebagian terpenting dari konsumen pers kita.

Ketiga, terjadi sentralisasi komunikasi politik. Dengan sedikit perkecualian, terjadi kemacetan komunikasi politik di berbagai institusi formal: partai, parlemen, kesenian, kotbah, pengadilan dan perkuliahan. Yang terjadi ialah indoktrinasi resmi dan baku dari pusat ke pinggir. Akibatnya pers laras menjadi katup pengaman dan forum yang tersisa bagi komunikasi politik dari-oleh-untuk rakyat. Komunikasi politik dalam pers juga menghadapi berbagai hambatan. Tetapi secara relatif, pers masih lebih longgar dan efektif ketimbang yang sudah disebut di atas. Juga jika dibandingkan media massa lain: televisi, radio, film. Walau sensor pers paling nyaring diperdebatkan orang, sensor media massa elektronik jauh lebih parah.

Konsekuensi

Proses pembentukan sosok pers mutakhir kita sangat menentukan konsekuensi sosialnya. Jika analisis di atas tidak terlalu keliru, kita dapat memahami sejumlah konsekuensinya.

Penerbitan pers merupakan kerjasama antar banyak pihak, antara lain kaum jurnalis dan pemodal. Karena pertumbuhan pers mutakhir kita bertolak dari prakarsa pemodal yang mencari jurnalis dan bukan sebaliknya, dapatlah dipahami orientasi komersial mendominasi watak pers kita. Bandingkan dengan kehidupan pers pada masa Demokrasi Terpimpin yang diprakarsai dan didominasi partai-partai politik. Kiblatnya jadi sangat politis.

Orientasi komersial sebenarnya tidaklah sejelek atau sejahat yang sering dikuatirkan orang. Juga tidak otomatis lebih jelek ketimbang orientasi politik dari masa Demokrasi Terpimpin. Orientasi komersial tidak fanatik pada berita perkosaan, kriminal dan iklan. Orientasi komersial melayani apa saja selera khalayak, termasuk debat politik dan filsafat asal hal itu dibeli konsumen dan praktek ini dilindungi hukum yang handal.

Konsekuensi dari interaksi yang saling menguntungkan di antara pertumbuhan angkatan kerja urban terdidik dan pertumbuhan pers mutakhir ialah konsolidasi atau

penguatan sebuah golongan sosial yang lebih populer disebut kelas menengah profesional. Kaum muda 1980an yang memegang tanggung jawab profesional besar pada usia lebih muda, menguasai teknologi komunikasi lebih canggih, terserap dalam jam kerja lebih panjang, dan menerima gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan kakak-kakak mereka.

Dengan kedudukan istimewa seperti itu, sulit dibayangkan para jurnalis muda itu menginginkan perubahan sosial besar-besaran. Sulit dibayangkan mereka akan lebih suka menjadi jurnalis di antara duri-duri petualangan politik (dan gaji pas-pasan) seperti yang dialami para pendahulunya dari jaman sebelum dan sesudah Demokrasi Terpimpin yang mengaku menikmati kebebasan jurnalistik jauh lebih besar.

Barangkali sumber gejolak terbesar dan wilayah perjuangan jurnalis mutakhir dalam jangka dekat ialah ada tidaknya asosiasi profesional dan serikat pekerja yang handal. Artinya, lebih wajar dan masuk akal mengharap mereka pertama-tama memilih memperjuangkan kepentingan sendiri sebelum membela pihak lain.

Pertumbuhan pers kita yang semakin profesional, disengaja dan dikehendaki atau tidak oleh penerbit dan jurnalisnya akan memberikan konsekuensi positif bagi proses latihan berdemokrasi. Bukan saja pers menjadi anjang pendidikan yang paling subversif dan politis, yakni berpendapat dan menendang pendapat orang lain secara publik. Lebih jauh lagi forum ini berlangsung dalam suatu mekanisme yang menembus batas-batas SARA, ideologi, geografi, seks yang kaku. Tidak semua batas itu ditembus secara gencar dan merata (apalagi dihancurkan) oleh pers kita. Namun sebagai institusi moderen, sedikit banyak pers menjadi sebuah kekuatan sosial pembentuk kesadaran dan solidaritas moderen pula.

Akhirnya, apa konsekuensi dari kedudukan pers sebagai lahan yang tersisa bagi komunikasi yang serba mace? Semua pihak terlalu banyak menuntut dan berharap serba muluk pada pers kita. Bukan hanya seniman meminta perhatian dan halaman lebih banyak untuk perbincangan seni. Pusat Pembinaan Bahasa punya daftar panjang tuntutan berbahasa. Juga pendidik dan pekerja sosial. Bahkan pemerintah yang sudah memonopoli siaran berita di media massa elektronik masih punya aneka pesan dan himbauan untuk pers.

(Habis)

*) Penulis adalah dosen Pasca Sarjana UK Satya Wacana, Salatiga.